

LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT) 2024 PT. BPR NUSAMBA WLINGI



A. PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Strategi keberlanjutan BPR Nusamba Wlingi dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), dan menyusun Laporan Keberlanjutan. Prinsip Keuangan Berkelanjutan meliputi :

1. Prinsip keuangan berkelanjutan
2. Tata kelola yang baik
3. Pengelolaan risiko sosial dan lingkungan
4. Pemberian akses keuangan yang inklusif
5. Investasi yang bertanggung jawab
6. Komunikasi yang informatif
7. Pengembangan sektor unggulan prioritas

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan meliputi :

1. Mencakup sasaran, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan keberlanjutan
2. Mencakup pengelolaan risiko sosial dan lingkungan

BPR mulai menyesuaikan kebijakan yang mendukung pembiayaan berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) untuk memastikan keamanan teknologi layanan pembiayaan, mengembangkan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi, serta melakukan kegiatan inklusi dan literasi keuangan. Implementasi ini sejalan dengan dukungan BPR pada pencapaian target Empat Pilar Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Tata Kelola.

B. IKHTISAR ASPEK KEBERLANJUTAN (EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN HIDUP)

1. Aspek Ekonomi

No.	Pos Keuangan	31 Des 2022	31 Des 2023	31 Des 2024
1	Total Aset	121.840.265.920	125.953.403.188	129.128.056.598
2	Total Pendapatan	26.230.142.208	28.022.136.210	26.726.691.938
3	Total KYD	82.355.461.779	90.079.617.283	83.031.845.598
4	Total Laba Rugi	5.847.486.932	6.200.076.658	4.567.674.343

2. Aspek Lingkungan Hidup

BPR Nusamba Wlingi sudah mulai menerapkan pelestarian lingkungan hidup melalui penghematan pemakaian kertas kantor, pelaporan kepada regulasi sudah mulai dilakukan secara online sehingga tidak dilakukan pengiriman data hardcopy lagi, hal tersebut sangat menghemat pemakaian kertas. Pemakaian listrik dengan melakukan penghematan untuk ruangan yang ditinggal agar dimatikan lampu dan AC, dan setiap karyawan yang akan pulang kantor seluruh ruangnya harus dimatikan. Hal tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup akibat pemakaian kertas yang berlebih yang dapat merusak tumbuh – tumbuhan. Demikian juga dengan penghematan listrik, dapat membantu mengurangi emisi karbon dari penggunaan PLN

3. Aspek Sosial

BPR bekerjasama dengan instansi pendidikan di wilayah PT. BPR Nusamba Wlingi dalam rangka pengenalan budaya menabung bagi peserta didik mulai dari TK sampai dengan SMA/Setara di wilayah kerja PT. BPR Nusamba Wlingi serta melaksanakan literasi dan inklusi keuangan dalam rangka bulan inklusi keuangan di semester 2 tahun 2024 yang diadakan bersama dengan Perbarindo korsek Blitar.

C. PROFIL SINGKAT BPR

a. Pendirian

PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Wlingi (selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta nomor 115 dari notaris Abdul Latief, S.H. di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas Anggaran Dasar No. C2-10258.HT.01.01.TH.89 tanggal 08 November 1989.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan berdasarkan Akta No. 41 tanggal 14 September 2018 dengan notaris Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta tentang Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0124653.AH.01.11 tanggal 21 September 2018.

Perubahan berdasarkan Akta No. 54 tanggal 23 November 2021 dengan notaris Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta tentang Perubahan Anggaran Dasar Pasal 4 tentang Modal, Pasal 7 tentang Pemindahan Hak atas Saham, Pasal 11 tentang Direksi, dan Pasal 14 tentang Dewan Komisaris. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0477695 tanggal 25 November 2021.

Perubahan berdasarkan Akta No. 21 tanggal 12 Oktober 2022 dengan notaris Fitri Budiani, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta tentang Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0073824.AH.01.02 tahun 2022 tanggal 12 Oktober 2022.

b. Visi dan Misi BPR

Visi BPR

Menjadi Bank yang Terpercaya dan Membangun Masa Depan

Misi BPR

1. Mendayagunakan seluruh asset perusahaan dengan semaksimal dan seefisien mungkin
2. Menjalin kemitraan secara profesional dan saling menguntungkan dengan seluruh stakeholders untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis.
3. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki secara kreatif, inovatif, dan produktif guna memberikan nilai tambah positif bagi Stakeholders.
4. Berperan terhadap masa depan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.
5. Berperan dalam pengembangan UMKM dengan memberikan pelayanan yang terbaik.

Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Berperan terhadap masa depan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Berperan dalam pengembangan UMKM sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan

c. Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 27 Desember 2019 di hadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, disebutkan bahwa dilakukan penambahan modal dasar sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Selain itu, modal ditempatkan dan disetor ditingkatkan dari Rp8.316.000.000,- (delapan miliar tiga ratus enam belas juta rupiah) menjadi Rp8.816.000.000,- (delapan miliar delapan ratus enam belas juta rupiah). Penambahan modal disetor tersebut diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Sentra Modal Harmoni sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nilai nominal per lembar sahamnya sebesar Rp100.000,-. Atas penambahan setoran modal tersebut, telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000160.AH.01.02 Th. 2020 tanggal 03 Januari 2020.

Atas persetujuan perubahan modal dasar tersebut, telah ditatausahakan dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan No. S-80/KO.04021/2020 tanggal 16 Januari 2020. Atas perubahan komposisi kepemilikan saham tersebut, telah ditatausahakan dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan No. S-15/KO.0402/2020 tanggal 20 Januari 2020. Komposisi kepemilikan saham per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jumlah Saham	Jumlah Modal (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Fajar Mas Murni	9,950	995,000,000	11.29%
2.	PT Sentra Modal Harmoni	78,210	7,821,000,000	88.71%
Jumlah Modal Disetor		88,160	8,816,000,000	100.00%

d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Nomor 23 tanggal 12 Desember 2023 di hadapan Notaris Fitri Budiani, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tentang Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Direksi. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0196792 tertanggal 15 Desember 2023.

Susunan pengurus per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Supriyanto, SE
- Komisaris : Nur salim, SE

Dewan Direksi:

- Direktur Utama : Nurkalim, SE
- Direktur : David Johan Wahyudi, SE

e. Lokasi Bank

Bank berkedudukan di Jl. Raya Tangkil No. 9A, Wlingi, Blitar, dengan jumlah karyawan tahun 2024 dan 2023 sebanyak 92 orang (86 orang dengan status tetap dan 6 orang dengan status tidak tetap) dan 96 orang.

Bank memiliki 1 (satu) kantor pusat, 1 (satu) kantor cabang, dan 9 (sembilan) kantor kas masing-masing sebagai berikut.

No.	Keterangan	Surat Persetujuan Tanggal	Bank Indonesia No. Surat	Alamat
1.	Kantor Pusat	18/01/1990	Kep.024/KM.13/1990	Jl. Raya Tangkil No. 9, Wlingi, Blitar
2.	Kantor Cabang Kepanjen	15/12/2022	S-194/KO.04021/2022	Jl. P. Sudirman No. 25, RT 005/RW 002, Kec. Kepanjen, Kab. Malang
3.	Kantor Kas Srengat	27/09/2005	7/708/DPBPR/IDA BPR/Kd	Jl. Raya Togogan No. 5, Kec. Srengat, Blitar
4.	Kantor Kas Kanigoro	23/03/2017	S-174/KO.042/2017	Jl. Kusuma Bangsa RT.02/RW.03 No. 20 Kanigoro, Kab. Blitar
5.	Kantor Kas Kademangan	17/01/2017	S-73/KO.042/2017	Jl. Trisula RT.004/RW.005, Kel. Kademangan, Kec. Kademangan, Kab. Blitar
6.	Kantor Kas Lodayo	01/03/2018	S-43/KO.04021/2018	Jl. Raya Utara Lingkungan Bulu RT.003/RW.001, Kel. Kalipang, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar
7.	Kantor Kas Kesamben	29/05/2008	10/395/DKBU/IDA d/Kd	Jl. Raya Kesamben No. 14, Kec. Kesamben, Blitar
8.	Kantor Kas Dayu	17/09/2021	S-263/KO.04021/2021	Jl. Raya Pasar Ngentak Dsn. Kambingan RT 004/RW 008 Dayu, Kab. Blitar
9.	Kantor Kas Tanjung (Relokasi KK Sanankulon)	27/07/2022	S-255/KO.0402/2022	Jl. Tanjung, Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar
10.	Kantor Kas Pakisaji	23/03/2017	S-168/KO.042/2017	Jl. Raya Karang Pandan No. 267, Pakisaji
11.	Kantor Kas Sumberpucung	13/12/2010	12/728/DKBU/IDA d/Kd	Jl. Jendral Sudirman No. 285, Sumberpucung, Kab. Malang

f. Skala Usaha BPR

a. Total Aset dan Total Kewajiban

No.	Pos Keuangan	31 Des 2024
1	Total Aset (Rp. ribu)	Rp. 129.128.057
2	Total Kewajiban (Rp. ribu)	Rp. 106.605.029
3	Total Ekuitas (Rp. ribu)	Rp. 22.523.028

b. Jumlah Karyawan

1. Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	31 Des 2024
1	Laki-laki	59
2	Perempuan	41
	Total	100

2. Jumlah Karyawan Berdasarkan Komposisi

No.	Jabatan	31 Des 2024
1	Pengurus	4
2	SDM Bisnis	45
3	SDM Non Bisnis	22
4	SDM Supporting	11
5	SDM Non Staf	18
	Total	100

3. Jumlah Karyawan Berdasarkan Generasi

No.	Generasi	31 Des 2024
1	Baby Boomer (1946-1964)	1
2	Gen-X (1965 – 1980)	6
3	Gen-Y (1981-1996)	69
4	Gen-Z (1997-2012)	24
	Total	100

4. Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	31 Des 2024
1	Pegawai Tetap	
	- Sarjana Strata 3 (S3)	
	- Sarjana Strata 2 (S2)	1
	- Sarjana Strata 1 (S1)	67
	- Diploma 3 (D3)	6
	- SLTA	12
	- Lainnya	
2	Pegawai Tidak Tetap	
	- Sarjana Strata 3 (S3)	
	- Sarjana Strata 2 (S2)	
	- Sarjana Strata 1 (S1)	6
	- Diploma 3 (D3)	8
	- SLTA	
	- Lainnya	
	Total	100

g. Perubahan yang bersifat signifikan

1. Tidak terdapat penutupan atau pembukaan Kantor Cabang
2. Tidak terdapat perubahan struktur kepemilikan BPR
3. Rencana aksi korporasi merger dengan Nusamba Grup di wilayah Jawa Timur

D. PENJELASAN DIREKSI

1. Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

a. Penjelasan Nilai Keberlanjutan Bagi BPR

Laporan keberlanjutan berisi kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berbasis pada prinsip Keuangan Berkelanjutan. Implementasi ini sejalan dengan respon Perusahaan dalam menyikapi perkembangan ekonomi global dan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. POJK No.51/ POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Melalui laporan ini, Direksi BPR juga mengungkapkan dukungan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). POJK No.51/ POJK.03/2017, menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya dengan selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Perusahaan (ekonomi), sosial dan lingkungan hidup.

b. Penjelasan Respon BPR Terhadap Isu Terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Mengikuti dinamika bisnis yang semakin kompleks, Direksi BPR menyusun strategi keberlanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. Selain memusatkan perhatian pada pencapaian target bisnis dan operasional, Perusahaan juga berupaya mengikuti arahan strategi keberlanjutan dan menyalurkan pembiayaan terhadap produk-produk ramah lingkungan. Dalam kegiatan sehari-hari, Perusahaan berusaha menerapkan kebiasaan-kebiasaan ramah lingkungan khususnya terkait dengan kegiatan hemat energi dan penghematan penggunaan kertas. Melalui laporan ini, Direksi menyampaikan kinerja keberlanjutan Perusahaan dan komitmen yang kami jalankan dalam mengimplementasikan program-program keberlanjutan.

c. Penjelasan komitmen pimpinan BPR dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan

Penyesuaian untuk mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan telah dilaksanakan sejak dibuatnya RAKB pada 2024. Sepanjang implementasi hingga tahun 2025, Perusahaan menitikberatkan pada penyesuaian kebijakan, dan melaksanakan pelatihan internal. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan ini adalah kesadaran untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang sejalan dengan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan. Selain itu, penyesuaian kebijakan dan pemetaan kegiatan pembiayaan juga memerlukan kerja sama antar unit kerja sehingga diperlukan koordinasi yang terus-menerus. Direksi berkomitmen menerapkan Keuangan Berkelanjutan, melaksanakan RAKB, serta mendukung pembangunan keberlanjutan melalui pembiayaan kepada para debitur. Direksi menyadari bahwa tantangan pencapaian Keuangan Berkelanjutan ini masih perlu dikelola dengan baik. Untuk itu, Direksi BPR mengajak segenap karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama membangun budaya keberlanjutan demi mencapai hasil yang optimal untuk tahun-tahun mendatang.

d. Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Pencapaian kinerja Keuangan Berkelanjutan yang disajikan dalam laporan ini mengandung tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan

2. Penerapan Keuangan Berkelanjutan

a. Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan

1. Kinerja Aspek Ekonomi

No.	Pos Keuangan	Proyeksi 2024	Realisasi 2024	% Pencapaian
1	Total Aset (Rp ribu)	134.439.763	129.128.057	96,05%
2	Total Tabungan	47.118.958	49.198.869	104,41%
3	Total Deposito	59.416.300	55.350.452	93,16%
4	Total KYD	101.459.900	83.031.846	81,84%
5	Total Laba Rugi	7.034.395	4.567.674	64,93%

2. Kinerja Aspek Sosial

- BPR telah memberikan layanan yang setara kepada semua debitur atas produk dan/atau jasa yang dimiliki serta menyampaikan informasi produk dan/atau jasa akurat kepada debitur.
- BPR telah memberikan pelatihan Keuangan Berkelanjutan yang diikuti oleh seluruh karyawan serta sosialisasi dan pelatihan antifraud untuk meningkatkan kesadaran pada perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab.
- BPR telah melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan dampak positif tentang produk keuangan terhadap masyarakat termasuk dalam program literasi dan inklusi keuangan
- BPR telah memberikan pendampingan dan penjelasan yang lengkap dan benar mengenai, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kinerja Aspek Lingkungan

- BPR telah melakukan penghematan listrik dengan cara mematikan semua sarana kerja yang menggunakan arus listrik pada saat sudah selesai kerja atau setelah selesai aktivitas jam kerja.
- BPR telah mengatur penggunaan kendaraan dinas/operasional secara efisien.
- BPR telah mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan administrasi, antara lain dengan menggunakan korespondensi internal secara elektronik (email/ online chat group) dan bila terpaksa dapat menggunakan kertas bekas untuk koresponden yang bersifat rutin

b. Penjelasan Prestasi Dan Tantangan Termasuk Peristiwa Penting Selama Periode Pelaporan

BPR memperketat pengawasan terhadap kebijakan pemberian kredit dengan memperhatikan dampak negatif risiko yang ditimbulkannya, terutama pada kelestarian lingkungan. Perusahaan mendukung para debitur untuk memiliki sertifikasi lingkungan, maupun sertifikasi bangunan berwawasan lingkungan. BPR melakukan aksi korporasi merger dengan Nusamba Grup di wilayah Jawa Timur.

c. Strategi Pencapaian Target

1. Pengelolaan Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Terkait Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan merupakan bagian dari risiko bisnis, dalam pelaksanaan pengawasan dibawah Direksi yang Membawahi Fungsi Kepatuhan terutama Bagian Manajemen Risiko. Pengelolaan risiko ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai target kinerja Perusahaan

Strategi pengembangan bisnis kedepan terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan, BPR akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- a. Perusahaan berupaya mencari mitra strategis yang peduli dan ramah kepada lingkungan dan sosial serta peduli kepada kelestarian lingkungan hidup.
- b. Perusahaan terus menjaga reputasi terhadap pihak antara lain; pemerintah sebagai regulator, para pemegang saham sebagai pendana dan masyarakat, hal ini dilakukan sebagai wujud aktifitas Perusahaan agar tidak berdampak sosial.
- c. Memakai dan menggunakan infra struktur yang ramah lingkungan

2. Pemanfaatan Peluang Dan Prospek Usaha

Peluang dan prospek usaha BPR antara lain berupa dukungan pemerintah kepada BPR untuk membiayai Kategori Kredit Usaha Berkelanjutan/KKUB sesuai dengan Pedoman Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 dan membuka akses keuangan inklusif. Perubahan bisnis yang terjadi dari yang sudah berjalan saat ini menjadi bisnis yang peduli lingkungan juga menjadi salah satu peluang bagi pemberian pembiayaan berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Selain itu, dalam hal teknologi, besarnya peluang untuk menerapkan proses digital dapat membantu meningkatkan keunggulan bersaing Perusahaan

3. Penjelasan Situasi Eksternal Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Hidup Yang Berpotensi Mempengaruhi Keberlanjutan BPR

Tahun 2024 merupakan tahun dengan dinamika yang cukup kompleks dan percepatan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun seiring dengan hal tersebut, terdapat juga tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi dan dilewati

oleh BPR. Menyadari hal ini, BPR tetap berusaha menjalankan komitmen untuk mengimplementasikan strategi berkelanjutan yang sudah disiapkan. Pemberlakuan Cadangan Kerugian Penyisihan Nilai (CKPN) merupakan tantangan baru bagi BPR untuk lebih baik dalam pemeliharaan kualitas kredit dan BPR harus menyesuaikan strategi dengan perkembangan kondisi dan memaksimalkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaannya.

E. TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Dalam menerapkan GCG, Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dengan rincian :

Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
Transparansi	Perseroan berkomitmen untuk memberikan informasi secara jelas, terbuka, dan akurat untuk para pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh Perseroan dengan tetap mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penjelasan Rencana Anggaran Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025 - Penerbitan Laporan Tahunan 2024 - Penerbitan Laporan Keberlanjutan 2024 - Penerbitan Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, triwulan dan bulanan - Penerbitan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola 2024
Akuntabilitas	Perseroan menerapkan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban, sehingga pengelolaan bisnis dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen senantiasa membuat job descriptions yang jelas kepada semua pegawai dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dengan demikian, seluruh organ Perseroan memiliki kejelasan hak dan kewajiban, fungsi dan tanggung jawab, serta kewenangannya dalam setiap kebijakan Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian tugas yang jelas antar organ Perseroan, termasuk dengan merinci tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi - Menerapkan check and balance system. - Memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai-nilai Perseroan (corporate core values), sasaran usaha, dan strategi Perseroan - Memiliki sistem reward dan punishment.
Pertanggung jawaban	Pertanggungjawaban diwujudkan dengan dipenuhinya kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> - Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
	Perseroan dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan bidang usahanya, antara lain ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kewajiban perpajakan, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta persaingan usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu - Melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) - Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang berlaku
Indepedensi	Kemandirian atau independensi adalah sebuah keadaan di mana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam pelaksanaannya, kemandirian atau independensi dapat diwujudkan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang masing-masing organ	<ul style="list-style-type: none"> - Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara organ Perseroan - Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan Perseroan - Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan dengan menandatangani pakta integritas. - Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.
Kewajaran	Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perseroan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dengan memberikan penghargaan dan	Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perseroan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dengan memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan kinerjanya tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin

Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
	pengharkatan sesuai dengan kinerjanya tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin	

a. Uraian Mengenai Tugas Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris, Pegawai, Pejabat Dan/Atau Unit Kerja Yang Menjadi Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Satuan Kerja	Tugas & Tanggung Jawab
Dewan Komisaris	Mengawasi Kebijakan Direksi Dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan
Direksi	Pengarah/Pengambil Keputusan/Kebijakan Penerapan Keuangan Berkelanjutan
Unit Kerja Manajemen Risiko	Melakukan penyesuaian analisis manajemen risiko Keuangan Berkelanjutan sesuai ketentuan Regulator
Unit Kerja Pemasaran	Merencanakan peningkatan portfolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan
Unit Kerja SDM	Menyusun agenda pengembangan kapasitas SDM mengenai Keuangan Berkelanjutan
Unit Kerja Operasional	Menyusun Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)

b. Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Bank telah mengikutsertakan pejabat/pegawai untuk mengikuti training terkait AMDAL/ manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup sehingga pegawai/pejabat dapat memahami dengan baik konsep dasar Kegiatan Keuangan Berkelanjutan

c. Prosedur BPR dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko BPR.

- Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, terdapat risiko-risiko yang muncul seiring dengan pelaksanaannya. Risiko yang teridentifikasi, salah satunya adalah penyesuaian syarat pengajuan kredit untuk meningkatkan portofolio hijau. BPR berusaha menerapkan

manajemen risiko lingkungan, sosial, & tata kelola (LST) dalam proses penilaian kelayakan kredit usaha yang diberikan.

- Implementasi manajemen risiko lingkungan, sosial, & tata kelola (LST), antara lain:
 - a. Melakukan verifikasi debitur yang masuk dalam kategori konstruksi berwawasan hijau antara lain:
 - Bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam secara efektif, efisien, dan bijaksana
 - Bidang usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja;
 - Bidang usaha yang mampu meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 - b. BPR telah melaksanakan tindakan terhadap debitur yang belum melengkapi izin lingkungan, antara lain:
 - Menyusun kebijakan untuk mensyaratkan kepada calon debitur baru yang berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST), antara lain dengan memberikan nilai rating lebih tinggi dibandingkan dengan calon debitur yang belum berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) dalam penilaian debitur.
- Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi turut mengawasi jalannya penerapan Keuangan Berkelanjutan. Cakupan pengawasan terdiri dari pengendalian risiko, pelaksanaan, kebijakan, dan perkembangan Keuangan Berkelanjutan. Secara langsung, Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan juga mengawasi penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), penyesuaian kebijakan kredit, visi dan misi keberlanjutan, serta penyusunan laporan keberlanjutan
- d. **Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan**
 - Penerapan Keuangan Berkelanjutan membutuhkan persiapan yang matang dan banyak penyesuaian. Pada praktiknya, Perusahaan membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, baik internal maupun eksternal.
 - Pengaruh penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Perusahaan adalah adanya perubahan cara pandang dalam menjalankan kegiatan usaha, serta perilaku bisnis sehari-hari. BPR akan terus menyesuaikan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan tahap demi tahap untuk menjadi lebih baik.

F. KINERJA KEBERLANJUTAN

a. Kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal BPR

- Guna membangun budaya keberlanjutan, Perusahaan secara konstan memasukkan value keberlanjutan dalam kegiatan yang dilaksanakan seperti meminimalkan penggunaan

kertas, sosialisasi penggunaan botol minum selama rapat dan pengenalan mengenai pengelolaan sampah padat di lingkungan kantor. Budaya keberlanjutan mulai dibangun dengan melibatkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan keseharian dalam bekerja.

b. Kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir

* dalam ribuan

Pos	Proyeksi 2022	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Realisasi 2024
Total Aset	120.010.412	121.840.266	125.093.592	125.953.403	134.439.763	129.128.057
Total Tabungan	43.250.631	42.711.930	42.834.979	44.967.724	47.118.958	49.198.869
Total Deposito	49.841.000	51.194.200	55.831.300	53.691.400	59.416.300	55.350.452
Total KYD	86.768.368	82.355.462	90.147.223	90.079.617	101.459.900	83.031.846
Laba Rugi	6.407.578	5.847.487	5.872.922	6.200.077	7.034.395	4.567.674

BPR mencatat pertumbuhan kredit yang positif. Penyaluran kredit terbesar ada di segmen *Kredit UMKM*. Melalui penyaluran kredit, BPR turut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia seperti yang nampak pada tabel dibawah ini :

* dalam ribuan

Pos	Proyeksi 2022	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Realisasi 2024
Kredit Mikro	40.815.840	38.740.009	42.405.254	42.373.452	40.756.442	33.353.893
Kredit Kecil	40.486.120	38.427.058	42.062.694	42.031.149	51.054.622	41.781.625
Kredit Menengah	5.466.407	5.188.394	5.679.275	5.675.016	9.648.836	7.896.328
Kredit Lainnya						
Total Kredit	86.768.368	82.355.462	90.147.223	90.079.617	101.459.900	83.031.846

c. Kinerja Sosial

1. Komitmen BPR

BPR berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama sesuai dengan kompetensi bagi pegawai perempuan dan laki-laki. Perusahaan berkomitmen untuk tidak mempekerjakan pegawai di bawah umur sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan. Dalam memberikan layanan jasa keuangan maupun memasarkan produk-produk pembiayaan, BPR menerapkan azas kesetaraan. Bagi seluruh nasabah dan debitur eksisting, maupun calon nasabah dan calon debitur akan dilayani dengan baik tanpa diskriminasi. Hal ini juga berlaku pada nasabah dan debitur berkebutuhan khusus/disabilitas Perusahaan akan tetap memberikan pelayanan produk sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan mereka.

2. Ketenagakerjaan

Dalam manajemen sumber daya manusia, perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama sesuai dengan kompetensi karyawan, baik Wanita maupun pria. Kesempatan yang sama berlaku bagi setiap karyawan tanpa memandang latar belakang maupun gender

No.	Gender	2022	2023	2024
1	Karyawan Pria	59	58	61
2	Karyawan Wanita	39	38	39
	Total	105	103	100

BPR memberikan imbal jasa pekerjaan atau remunerasi sesuai dengan beban dan posisi kerja. Pembayaran remunerasi juga merupakan bagian dari nilai ekonomi langsung yang didistribusikan. Pemberian remunerasi tidak membedakan gender. Namun, perbedaan dapat terjadi karena status ketenagakerjaan, jenjang jabatan, prestasi kerja, dan lama kerja. Bentuk remunerasi antara lain gaji pokok, tunjangan, dan insentif lainnya.

Manajemen SDM memperhatikan kualitas dan kompetensi setiap karyawan. Setiap tahunnya, Perusahaan selalu mengusahakan pengadaan pelatihan dan pengembangan kemampuan untuk seluruh karyawan. Perusahaan juga mengirimkan karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga eksternal.

3. Masyarakat

Pemerintah memiliki komitmen untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi pengelolaan keuangan pada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan inklusi dan literasi keuangan menjadi kewajiban bagi semua perbankan. BPR akan melakukan kegiatan inklusi dan literasi keuangan secara berkala untuk memberikan edukasi mengenai Lembaga Jasa Keuangan kepada masyarakat

Setiap nasabah yang mendapatkan dampak negatif atas layanan Perusahaan, berhak menyampaikan pengaduan. Di BPR, pengaduan nasabah, termasuk masyarakat, dibedakan menjadi:

1. Masyarakat selaku nasabah yang melaporkan hal-hal seperti pengaduan, dan ketidakpuasan terkait produk dan layanan kredit, dugaan fraud yang dilakukan oleh karyawan, dan lainnya;
2. Masyarakat umum nasabah maupun bukan nasabah, yang melaporkan pengaduan atas kegiatan BPR yang bersinggungan dengan mereka, seperti kegiatan pemasaran produk dan layanan pembiayaan, kegiatan sosial, dan lainnya.

Untuk memberikan respon atas pengaduan yang diterima, Perusahaan memiliki mekanisme dan unit yang menangani pengaduan nasabah. Pengaduan dapat disampaikan melalui email BPR atau call center BPR. Keberadaan Unit Layanan Pengaduan Konsumen akan terus meningkatkan kualitas dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, serta menyelesaikan setiap pengaduan dengan baik, serta memberikan perlindungan kerahasiaan pelapor sesuai ketentuan.

d. Kinerja Lingkungan

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak menerima pengaduan terkait dampak negatif lingkungan hidup dan tidak mendapat laporan pengaduan lingkungan yang berasal dari debitur atau nasabah. Dengan demikian, Perusahaan tidak mengeluarkan biaya akibat denda atau ketidakpatuhan pada pelestarian lingkungan hidup

LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT) 2024
PT BPR NUSAMBA WLINGI



Demikian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun 2024 sesuai Lampiran II POJK Nomor 51/POJK.03/2017 kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wlingi, 30 April 2025
PT BPR NUSAMBA WLINGI
Direksi

Nurkalim, SE
Direktur Utama



David Johan Wahyudi, SE
Direktur

Dewan Komisaris

Supriyanto, SE
Komisaris Utama

Nur Salim, SE
Komisaris